

**KETERKAITAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DENGAN MATAPELAJARAN LAIN DALAM
FAKTA SEJARAH**

**Toni Nasution¹, Lu’Lu Rahmadanti², Melvi Sari Anggraini³,
Fadiah Dian Nashfati⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

toninasution@uinsu.ac.id¹, lulurahmadanti25@gmail.com², melviani797@gmail.com³,
fadiahdian@gmail.com⁴.

Abstract: *Citizenship education plays a role in every educational institution in Indonesia, especially in tertiary institutions, namely that students are expected to have insight and national awareness and form a caring attitude towards others. Teaching materials for civic education applied in tertiary institutions are associated with other subjects such as religious education, Pancasila moral education, social education, and the history of the formation of Pancasila as the foundation of the state. the method used in collecting information in this article uses the method of literature analysis. With sources of information in the form of books and journals.*

From the results of this analysis it is expected that citizenship education will become a basic subject that must exist at every level of education in Indonesia, especially at tertiary institutions. So that future generations of the nation are not only good citizens, but also instill the meaning of Pancasila in their character, nature and deeds and are able to apply the values of citizenship in their daily lives, both in the social environment and in the learning environment in universities. In addition, citizenship education also functions to shape the character of students to become individuals who are democratic and virtuous and care for others in the life of the nation and state.

keyword: *civic education, historical facts.*

Abstrak: pendidikan kewarganegaraan berperan dalam setiap lembaga pendidikan di indonesia, terutama pada perguruan tinggi, yaitu diharapkan mahasiswa dapat memiliki wawasan dan kesadaran kebangsaan serta membentuk sikap peduli terhadap sesama. Bahan ajar Pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan diperguruan tinggi dikaitkan dengan mata pelajaran lain seperti pendidikan agama, pendidikan moral pancasila, ilmu pendidikan sosial, serta sejarah pembentukan pancasila sebagai dasar kenegaraan. metode yang digunakan dalam pengumpulan informasi artikel ini menggunakan metode studi analisis pustaka. Dengan sumber informasi berupa buku dan jurnal.

Dari hasil analisis ini diharapkan pendidikan kewarganegaraan menjadi mata pelajaran pokok yang harus ada disetiap jenjang pendidikan diindonesia, terutama pada perguruan tinggi. Agar generasi bangsa kedepannya tidak hanya mewarganegarakan secara baik, tetapi juga tertanam arti pancasila didalam wataknya, sifatnya dan amalnya dan mampu menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan itu dalam kehidupan sehari harinya, baik dalam lingkungan sosial maupun lingkungan belajar di perguruan tinggi. Selain itu pendidikan kewarganegaraan juga berfungsi membentuk karakter mahasiswa menjadi pribadi yang bersikap demokratis dan berbudi luhur serta peduli terhadap sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: pendidikan kewarganegaraan, fakta sejarah.

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu bidang kajian ilmu yang terapkan di segala jenjang pendidikan negara indonesia. Baik di SD, SMP, SMA, serta perguruan tinggi. Pembentukan peserta didik agar menjadi pribadi yang memiliki jiwa kebangsaan dan rasa cinta terhadap tanah air, telah dijelaskan didalam Undang- Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting bagi generasi penerus bangsa indonesia, agar dapat menciptakan generasi bangsa yang Pancasialis, yang mempunyai jiwa pembangun yang rela dan siap membangun bangsanya. Untuk menjadikan generasi yang dapat meneruskan tonggak kepemimpinan bangsa indonesia, hendaknya pemberian materi pendidikan kewarganegaraan diterapkan merata diseluruh jenjang sekolah dan diamalkan dengan baik.(Sofyan & Sundawa, 2016)

Pendidikan kewarganegaraan secara umum bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air dalam setiap jiwa bangsa Indonesia, yang berdasarkan nilai dan moral Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan yang diberikan kepada peserta didik didasarkan pada norma-norma yang berlaku diindonesia serta dikaitkan dengan nilai karakter, nilai moral keagamaan dan juga nilai sejarah. Dengan demikian diharapkan peserta didik tidak hanya menjadi pribadi yang nasionalis, akan tetapi juga beretika dan bermoral dan dapat hidup dengan baik di lingkungan sosial masyarakat.(Raharjo, 2019)

Saat ini bangsa Indonesia sedang dalam kondisi kemunduran dalam hal pemahaman, penerapan dan juga semangat nasionalisme. Hal tersebut menjadi evaluasi bagi kita untuk memerbaiki semuanya sebelum sesuatu yang lebih buruk menimpa negara indonesia. Langkah sederhana yang dapat dilakukan dimulai dari menanamkan pemahaman tentang kewarganegaraan dan pentingnya kewarganegaraan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODOLOGI

Metode pengumpulan data yang digunakan pada analisis yang berjudul “keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya dalam fakta sejarah”, yaitu menggunakan studi analisis pustaka. Pengumpulan data analisis ini menggunakan sumber media berupa buku, jurnal dan artikel.

Metode studi analisis pustaka adalah suatu metode pengumpulan data berupa pencarian data atau informasi melalui dokumen tertulis, dokumen tidak tertulis, gambar, maupun foto yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Pada metode studi analisis pustaka terdapat empat ciri yaitu : pertama, penulis tidak terjun langsung kelapangan, melainkan berhadapan dengan teks atau data. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Ketiga, data pustaka adalah data yang tidak asli dari data dilapangan atau disebut juga dari tangan kedua. Keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan hal tersebut ,maka pengumpulan data dalam analisis ini dilakukan dengan menelaah dan mengeksplor beberapa buku, jurnal, dan artikel yang dianggap relevan dengan analisis kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan nilai luhur, nilai moral serta nilai kebudayaan berdasarkan keyakinan bangsa Indonesia. Sehingga nilai-nilai tersebut dapat dimaknai dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(L, 2019)

Pendidikan kewarganegaraan memiliki dua sisi penting yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama yaitu, sebagai pedoman dan sarana bagi warga negara dalam memahami dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan undang–undang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua sebagai media pendidikan yang diberikan oleh pendidik secara sadar kepada peserta didik agar dapat memahami, menghayati dan menerapkan nilai moral Pancasila dan UUD dalam lingkungan sosial sehari-hari. (Yusnawan Lubis dan Dwi Nanta Priharto, 2021)

Dengan diberikannya materi pendidikan kewarganegaraan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia diharapkan peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Berfikir rasional, kritis dan logis berlandaskan Pancasila dan UUD dalam menghadapi masalah kewarganegaraan.
2. Rela ikut serta dan aktif dalam upaya memajukan negara, mencegah perpecahan negara, serta menjaga nilai-nilai nasionalisme.
3. Berkembang dan membentuk karakter yang positif agar dapat hidup bersama dalam lingkungan sosial masyarakat.
4. Berkompetsi dan berintegrasi dengan negara lainndemi kemajuan negara Indonesia dengan memanfaatkan, teknologi, informasi dan komunikasi

A. Keterkaitan PPKN Dengan Pendidikan Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majmuk. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman suku, adat istiadat, keturunan, bahasa daerah, keyakinan, warna kulit, maupun kebiasaannya. Masyarakat Indonesia memiliki pandangan hidup dan suatu dasar yang sama yaitu Pancasila. Masyarakat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2): “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu”. Dan dipertegas dengan ketetapan MPR no.11 MPR A 1978 kususnya bagian penjelasan atas bab 2 angka 1 dari P-4 secara jelas merumuskan sebagai berikut : ” dengan rumusan sila ketuanan yang maha esa, seperti tersebut pada bab 2 angka 1 tidak berarti bahwa negara memaksa agama atau sesuatu kepercayaan teradap tuhan yang maha esa”.

Atas dasar tersebut, pendidikan kewarganegaraan bersifat netral maka warga negara Indonesia tidak boleh memaksakan suatu kepercayaan atau agama teradap orang lain. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan UUD dan Pancasila, yang didalamnya terkandung semua nilai-nilai yang bertujuan membangun karakter seseorang serta mempersatukan masyarakat dan bangsa Indonesia. Maka dapat disimpulkan, bahwa moral yang terkandung dalam Pancasila adalah moral umum.

Moral untuk seluruh bangsa Indonesia. Siapapun, dimanapun, kapanpun tanpa terkecuali wajib mendapatkan pendidikan moral.

Tujuan pendidikan moral Pancasila yaitu, menjadikan warga negara Indonesia menjadi masyarakat yang bertingkah laku baik sesuai norma-norma yang berlaku. dengan cara memberi pemahaman berupa pembelajaran pendidikan moral Pancasila disertai pendidikan kewarganegaraan. PPKN juga mendidik agar kebiasaan dan tangkah laku yang baik dan sudah membudaya didalam masyarakat tetap terpelihara misalnya : mendoakan seseorang .(Budiman, 2003)

Dengan diterapkannya materi PPKN diharapkan peserta didik tertanam dalam dirinya, rasa toleransi dan menghargai perbedaan keyakinan serta tidak memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. Hal ini jelas bahwa semua peserta didik dengan latar belakang agama apapun wajib mendapatkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sekaligus mendapatkan pendidikan agama yang dapat memperkuat iman bagi pemeluknya masing masing .

B. Keterkaitan PMP Dengan PKN

Pendidikan moral pancasila merupakan ilmu pengetauan yang membina anak didik untuk menjadi warga negara yang baik, agar peserta didik menyadari potensi dan harga dirinya sebagai warga negara, mengerti hak dan kewajibannya dalam bidang kehidupan antara manusia dan lembaga.(Samsuri, 2004)

Pendidikan moral Pancasila dengan pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dalam membentuk masyarakat yang berbudi pekerti baik. Hubungan PMP dan PKN dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan moral Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sama-sama menggunakan kata pendidikan, yang artinya proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam yang sesama manusia pada prinsipnya pembentukan kedewasaan

- 2) Pendidikan kewarganegaraan ditujukan untuk membentuk kepribadian warga negara yang baik. akan tetapi belum tentu bersifat pancasialis.
- 3) Sedangkan PMP dan PPKN adalah khas Indonesia yaitu pendidikan Pancasila dalam konteks undang-undang 1945. PMP dan PPKN tidak hanya mewarganegarakan secara baik, tetapi yang dipancasilakan adalah wataknya, sifatnya dan amalnya, sehingga pada akhirnya tercipta “manusia Indonesia yang pancasialis” yaitu manusia yang berpantasila, bersikap demokratis, dan berbudi luhur.

Perbedaan yang sangat prinsip yaitu pendidikan moral Pancasila selain membentuk warga negara menjadi pribadi yang memiliki tingkah laku baik, juga membentuk warga negara yang pancasialis, yaitu manusia Indonesia yang mempunyai jiwa pembangun yang rela dan siap membangun bangsanya.

C. Keterkaitan PPKN Dengan Pendidikan IPS

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan ilmu yang membahas tentang hubungan individu dengan individu lainnya dan segala yang berkaitan dengan sosial, serta bertujuan membina sikap yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan IPS memiliki fungsi pembinaan kecerdasan dan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan sosial, agar dapat mengatasi segala masalah yang terjadi didalam lingkungan sosial. jika pendidikan IPS merupakan pemahaman keterkaitan antara suatu hubungan sistem nilai dengan nilai lainnya (cross, trans, multi, dan inter discipline) maka dalam pendidikan moral sistem nilai yang terkandung dalam undang-undang dan Pancasila merupakan pemahaman atas sistem nilai itu. (Darmadi : 2014)

D. Fakta Sejarah Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan fakta sejarah bahwa dalam periode demokrasi terpimpin yang juga dikenal dengan sebutan orde lama, Pancasila dasar negara republik Indonesia telah mengalami rongrongan yang hebat dari ideologi marxisme-leninisme. Sejarah proses perumusan Pancasila perlu ditindak lanjuti agar generasi muda juga tau bagaimana proses terbentuknya dasar negara, serta memahami makna Pancasila agar menemukan titik temu pembahasan.

1. Identitas Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara republik Indonesia yang berisi rumusan autentik. Rumusan autentik Pancasila disahkan pada tanggal 18 agustus 1945 dan terdapat dalam pembukaan UUD 1945. oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia.

Ketetapan MPRS No. XX Tahun 1966, yang didukung oleh ketetapan MPR No.V Tahun 1966, yang diperkuat dengan ketetapan MPR No. II Tahun 1978, menjelaskan tempat dan isi rumusan Pancasila sebagai penghayatan dan pengamalan serta pedoman nilai Pancasila. atau yang biasa dikenal dengan sebutan “Eka Prasetya Panca Karsa”

2. Bung Karno Dan Rumusan Pancasila

Ir. Soekarno merupakan salah satu tokoh perumus Pancasila. Maka dari itu keberadaan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari jasa-jasanya. kita harus menghargai pengorbanan dan jasa-jasanya yang telah memimpin dan mengantarkan bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan.

Pada masa akhir kekuasaan pemerintahannya yaitu pada masa orde baru, Ir. Soekarno memberikan kebebasan bergerak kepada PKI dalam melakukan G-30-S/PKI. Hal ini menjadi suatu konflik yang terjadi pada saat itu, karena segala kekuatan Pancasila dan keutuhan bangsa hampir hancur disebabkan peristiwa itu. Hal ini juga yang membuat Ir. Soekarno dicabut dari jabatannya.

3. Poses Perumusan Dasar Negara

Proses perumusan dasar negara Indonesia berlangsung pada masa akhir kependudukan jepang di Indonesia. Pada saat itu jepang menjanjukan kemerdekaan terhadap Indonesia, maka dibentuklah pemerintah jepang dengan nama Dokaritsu Junbi Cosakai yang artinya badan penyelidik kemerdekaan. Beberapa tokoh Indonesia dijadikan anggota dan diketuai oleh radjiman wedyodiningrat serta wakilnya yaitu R.P Soeroso.

Kemudian pelantikan anggota BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 28 mei 1945, oleh letnan jendral kumakuci harada di jawa. Keesokan harinya dimulai sidang pertama BPUPKI yang membahas rumusan dasar negara. tokoh perumus dasar negara terdiri dari tiga tokoh secara berturut yaitu : Mr.Moh.Yamin (29 mei), Prof. Dr.Soepomo (31 mei), dan terakhir Ir.Soekarno (1 juni).

Rumusan dasar negara Ir.Soekarno mendapat perhatian karena memiliki keistimewaan yaitu rumusannya berisi usul mengenai nama negara yakni Pancasila, trisila, ekasila dan juga pandangan mengenai Indonesia merdeka. Selanjutnya, tanggal 1 juga telah dibentuk panitia kecil bernama panitia Sembilan. Panitia ini berjumlah 8 orang anggota yang diketuai oleh bung Hatta. Panitia ini bertugas mengumpulkan saran-saran, usul atau pun pendapat yang diberikan anggota kepada ketua panitia.

Panitia Sembilan dibentuk karena kebutuhan untuk mencari modus antara apa yang disebut “golongan islam” dengan apa yang disebut “golongan kebangsaan” mengenai soal agama dan negara.panitia berhasil mencapai modus itu yang diberi nama “Piagam Jakarta oleh moh. Yamin”. Rumusan panitia sembilan itu diterima baik dan dioper oleh panitia kecil dan dilaporkan kepada siding pleno badan penyidik. Kemudian isi pembukaan undang-undang yang diambil dari pigam Jakarta disetujui oleh panitia perancang UUD pada tanggal 11 juli.. Selanjutnya pada tanggal 13 juli rancangan tersebut disempurnakan lebih lanjut.(Nurwardani, Paristiyanti, 2016)

Persidangan kedua dilakukan rapat pleno oleh badan penyelidik yaitu pada tanggal 14 juli 1945, yang menghasilkan keputusan:

- Pernyataan Indonesia merdeka
- Pembukaan UUD 1945
- Batang Tubuh UUD 1945

Dengan berbagai perjuangan dan persiapan yang telah dilakukan bangsa Indonesia, pada 17 agustus 1945 soekarno dan hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian dilanjut pada 18 agustus 1945 undang undang dasar ditetapkan secara sah, baik pembukaanya maupun isi atau batang tubuhnya.

KESIMPULAN

Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya diharapkan dapat diterapkan diberbagai jenjang pendidikan diindonesia. Pendidikan kewarganegaraan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik sebaiknya dikaitkan dengan matapelajaran lain seperti ilmu agama, pendidikan moral, ilmu pengetahuan sosial serta sejarah. agar tertanam dalam diri peserta didik jiwa nasionalis dan pancasialis serta agamais sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dengan berlaku sopan dalam lingkungan sosial, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Darmadi hamid (2014) *pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi*, Bandung, Alfabeta. <https://worldcat.org/en/title/859139478>

Budiman. (2003). Hubungan pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Kewarganegaraan. *Zitteliana*, 18(1), 22–27.

L, S. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Warga Negara Yang Cerdas Dan Baik (Smart and Good Citizen). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/13143>

Nurwardani, Paristiyanti, dkk. (2016). Pendidikan pancasila. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. <http://akbid-sby.org/new/wp-content/uploads/2018/09/Pendidikan-Pancasila-min.pdf>

Raharjo, A. D. I. (2019). Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Ips Dan Mata Pelajaran Lainnya. *Journal of Primary Education*. <http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/3by4z>

Samsuri. (2004). civic virtue dalam pendidikan moral dan Kn di Orde baru.pdf. In *Jurnal Civic Media Kajian Kewarganegaraan* (Vol. 1, Issue 2, pp. 225–239). <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/5719/4941>

Sofyan, F. S., & Sundawa, D. (2016). Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dan Semangat Nasionalisme Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(2), 185. <https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1455>

Srijanti, dkk. (2007). *Etika berwarga negara : pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi / Srijanti, A. Rahman, Purwanto S.K. ; editor, Kristianto Nandar*. Jakarta : Salemba Empat

Sumarono S. dkk, (2002). Pendidikan Kewarganegaraan , Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.<https://books.google.co.id/books?id=606SEiPPl0AC&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>

Yusnawan Lubis dan Dwi Nanta Priharto. (2021). Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD Kelas IV.
<https://bukusekolah.id/buku/buku-panduan-guru-pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-untuk-sd-kelas-4/#4>